

Pemerintahan Pascapemilu 2024: Sudut Pandang Pedagang Kaki Lima

Vijai Vitansi Saragih¹, Idamanta Firnandus², Kevin Adolf Putra Marbun³, Valensio Sandro Handika⁴, Gregorius Yuventus Pito Watun⁵, Atthaya Rakha Ismaya⁶
¹²³⁴⁵⁶Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
191007060@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Saragih, V. V., Firnandus, I., Marbun, K. A. P., Handika, V. S., Watun, G. Y. P., & Ismaya, A. R. (2025). Pemerintahan Pascapemilu 2024: Sudut Pandang Pedagang Kaki Lima. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, 11(1), 69–76.

ABSTRAK

Survei sederhana ini mendeskripsikan harapan-harapan para pedagang kaki lima terhadap pemerintahan baru pascapemilu 2024. Dari hasil wawancara dengan sepuluh informan di Yogyakarta, ditemukan aspirasi kuat terhadap penurunan sembako, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, serta pemberantasan korupsi. Para informan juga menyoroti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintahan baru, yakni inflasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan efektivitas program makan siang gratis. Studi ini juga memetakan kemungkinan analisis menggunakan beberapa teori, seperti fungsionalisme struktural, konflik, pilihan rasional, kebijakan publik, dan legitimasi. Studi ini menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Kata Kunci: harapan; partisipasi politik; pascapemilu 2024; Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This mini-survey describes street vendors' expectations for the new government after the 2024 elections. Interviews with ten informants in Yogyakarta revealed strong aspirations for reduced basic food prices, free education and healthcare, and the eradication of corruption. The informants also highlighted several challenges the new government might face, including inflation, layoffs, and the effectiveness of the free lunch program. The study also maps out possible analyses using several theories, such as structural functionalism, conflict, rational choice, public policy, and legitimacy. This study highlights the importance of transparent governance that is responsive to the basic needs of the community.

Keywords: expectations; political participation; post-2024 election government, street vendors

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan momen yang sangat dinanti- nantikan oleh masyarakat. Setiap kali pemerintahan baru akan dilantik, harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah baru menjadi sorotan utama. Hal ini tidak terkecuali untuk pemerintahan yang akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Pemerintahan yang baru memiliki tugas besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami harapan- harapan yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Dengan memahami harapan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh publik.

Survei sederhana ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai harapan masyarakat terhadap pemerintahan baru yang akan dilantik pada 2024. Dengan mengetahui harapan-harapan ini, diharapkan survei ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai harapan-harapan masyarakat ini, diharapkan hasil survei ini dapat memberikan sumbangan berarti dalam memandu kebijakan pemerintah baru agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.

METODE

Dalam rangka memahami harapan-harapan masyarakat atas pemerintahan baru yang dilantik pada 2024, survei ini menggunakan wawancara sebagai metode untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada beberapa pedagang kaki lima. Alasannya adalah pedagang kaki lima merupakan kelompok sosial masyarakat yang merepresentasikan golongan bawah yang sering menjadi sasaran janji-janji kampanye para pasangan calon presiden dan wakilnya. Kemudian, dalam tataran keseharian mereka adalah subjek-subjek yang mampu menjelaskan implementasi serta dampak konkret dari program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Wawancara dilakukan kepada 12 pedagang kaki lima sebagai informan. Mayoritas informan adalah laki-laki yang berusia antara 21 hingga 58 tahun dengan latar pendidikan terakhir SMA. Para informan ini bekerja sebagai pedagang makanan

ringan dan minuman seperti *cilor* (aci telur), es teh, jasuke (jagung susu keju), telur gulung, bakso bakar, martabak, tahu *walik*, singkong goreng, leker, angkringan, *cilok* (aci di-*colok*/ ditusuk), batagor (bakso tahu goreng), dan nasi pecel. Lama bekerja mereka juga bervariasi, mulai dari 2 hingga 13 tahun. Wawancara dilakukan di berbagai lokasi sesuai tempat di mana para informan ini berada, seperti di Nologaten, Mrican, Seturan, Pringwulung, dan Babarsari. Semua tempat ini ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan area yang cukup ramai dan potensial untuk usaha kaki lima.

Tabel 1. Daftar informan yang diwawancari (nama disamarkan).

N o	Nama (Samara n)	Jenis Kelami n (L/P)	Usia (tahu n)	Pendidik an	Jenis PKL	Lama Bekerj a (tahun)	Lokasi Wawancar a
1	Dodit	L	58	SMA	Pedagang <i>Cilor</i>	13	Nologaten
2	Sumini	P	45	SMA	Pedagang Es Teh	5	Mrican
3	Anton	L	34	SMA	Pedagang Jasuke	2	Nologaten
4	Kaka	L	32	SMA	Pedagang Telur Gulung	8	Seturan
5	Ridwan	L	29	SMA	Pedagang Bakso Bakar	10	Seturan
6	Ranto	L	32	SMA	Pedagang Martabak	5	Pringwulu ng
7	Rahman	L	24	SMA	Pedagang Tahu <i>Walik</i>	4	Seturan
8	Riki	L	28	SMA	Pedagang Singkong Goreng	6	Seturan
9	Agung	L	24	SMA	Pedagang Leker	2	Babarsari

10	Yuliman	L	40	SMA	Pedagang Angkring an	10	Babarsari
11	Sanento	L	21	SMA	Pedagang Cilok, Cilor, Batagor	2	Seturan
12	Tono	L	30	SMA	Pedagang Nasi Pecel	8	Seturan

Sumber: dokumen peneliti.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Temuan

Temuan survei sederhana ini disajikan berdasarkan 5 pertanyaan wawancara. Pertanyaan 1: Apa harapan Anda terhadap pemerintahan baru (presiden dan wakil presiden) yang akan dilantik pada Oktober 2024? Apa alasannya?

Harapan para informan untuk pemerintahan baru adalah peningkatan di sektor ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tata kelola pemerintahan. Secara khusus, mereka berharap agar ada penurunan harga sembako, peningkatan kualitas BPJS, dan sekolah gratis. Mereka berharap agar pemerintahan yang baru dapat mengakomodasi harapan mereka itu, karena sangat meringankan beban mereka sebagai rakyat kecil.

Lalu, mereka juga berharap agar pemerintahan yang baru mampu memberantas korupsi. Mereka menuturkan bahwa korupsi bahkan sering terjadi dalam hal distribusi bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh rakyat. Selain itu, mereka juga berharap agar pemerintahan yang baru membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang merata di semua daerah di Indonesia.

Pertanyaan 2: Program kerja apa dari pemerintahan baru yang Anda harapkan harus diwujudkan? Apa alasannya?

Mayoritas dari para informan mengharapkan pemerintahan yang baru membuat pendidikan yang gratis dan berkualitas sebagai salah satu program kerjanya. Menurut mereka, pendidikan yang gratis dan berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kemudian akan mendorong perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain itu, mereka juga berharap ada program kerja di aspek kesehatan. Mereka berharap agar pemerintahan yang baru menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas baik untuk semua warga negara.

Terakhir, para informan juga berharap agar ada pengembangan infrastruktur agar menjadi lebih modern dan memadai. Infrastruktur yang demikian akan mendorong konektivitas antar daerah yang maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Pertanyaan 3: Menurut Anda, tantangan atau masalah apa yang nanti akan dihadapi oleh pemerintahan baru? Apa alasannya?

Menurut para informan pemerintahan yang baru akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Pertama, program makan siang gratis. Program yang sudah diutarakan melalui kampanye ini menurut mereka akan membutuhkan banyak sekali biaya. Efektivitas dan transparansi program makan siang gratis menjadi tantangan khususnya. Kedua, kecenderungan pemutusan hubungan kerja yang makin lama semakin intens terjadi di beberapa daerah. Ketiga, ancaman inflasi. Keempat, korupsi di dalam pemerintahan itu sendiri. Mereka berharap agar pemerintah menerapkan hukum yang adil bagi semua pelaku korupsi.

Pertanyaan 4: Menurut pendapat Anda, apakah pemerintahan baru nanti mampu mewujudkan secara maksimal Indonesia Emas pada 2045 melalui berbagai program kerjanya? Apa alasannya?

Mayoritas para informan cukup yakin bahwa visi Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Namun, mereka menuturkan bahwa itu butuh tindakan nyata dari pemerintah dan rakyat. Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Sektor pendidikan adalah salah satu fondasi yang mampu mendukung visi itu. Maka, subsidi untuk pendidikan harus menjadi prioritas. Lalu, kolaborasi dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan, khususnya dengan golongan anak muda. Mereka adalah generasi yang paling akrab dengan era digital.

Pertanyaan 5: Menurut pendapat Anda, program kerja apa dari pemerintahan lama yang perlu diteruskan oleh pemerintahan baru? Apa alasannya?

Para informan secara spesifik menyebut bahwa pemerintahan yang baru dapat meneruskan beberapa program kerja yang sudah dilakukan oleh rezim sebelumnya, yakni di aspek bantuan sosial, layanan kesehatan, dan sembako. Beberapa program itu, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dll.

Pembahasan

Temuan-temuan hasil wawancara di atas dapat memunculkan kemungkinan analisis yang berkaitan dengan beberapa teori. Pertama, dalam teori fungsionalisme struktural harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang baru, antara lain, harga sembako yang murah, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas baik, pendidikan gratis, serta pemberantasan korupsi, dipandang sebagai fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh struktur pemerintahan. Pemenuhan ini penting dalam rangka menciptakan dan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Harga sembako dan layanan kesehatan yang terjangkau, misal, merupakan elemen vital agar masyarakat kecil dapat bertahan hidup dan merasa sejahtera dalam sistem sosial yang ada.

Di saat yang sama, harapan-harapan itu juga mencerminkan adanya ketegangan antar kelas sosial. Ini menjadi kemungkinan untuk analisis dengan teori konflik. Harapan sembako yang murah, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas baik menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi kekayaan dan layanan publik yang tidak merata atau timpang. Korupsi, menurut para informan, adalah faktor utama yang harus diberantas untuk merespon ketimpangan tersebut.

Lalu, harapan-harapan mereka itu juga bisa dibaca menggunakan teori pilihan rasional. Pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang terjangkau, misal, merupakan hasil dari kalkulasi rasional para individu. Artinya, masyarakat berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan cara meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan dasar. Rasionalitas pemerintahan yang baru kemudian dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan-kebijakan mereka mendukung harapan-harapan masyarakat itu.

Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih jauh dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik. Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan yang mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Analisis ini juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan peningkatan kebijakan oleh rezim baru agar manfaat yang optimal dan relevan bagi masyarakat tetap terwujud.

Manfaat yang optimal, relevansi dan keterbukaan program kerja bagi masyarakat, terutama golongan rentan, kemudian dapat ditarik ke perihal bagaimana legitimasi rasional-legal diupayakan. Harapan terhadap kebijakan ekonomi yang stabil dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mencapai legitimasi tersebut. Kebijakan akan dianggap sah bukan hanya karena telah sesuai dengan aturan, tapi juga telah memberi manfaat konkret bagi masyarakatnya. Teori legitimasi dari Max Weber dapat dipakai untuk analisis ini.

Tentu saja, manfaat konkret suatu program kerja harus dilihat dari seberapa optimal program kerja itu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Teori kebutuhan dasar dari Abraham Maslow sangat berguna dalam hal ini. Harapan-harapan para pedagang kaki lima atas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai merupakan cerminan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka demi mencapai kesejahteraan.

PENUTUP

Harapan-harapan para pedagang kaki lima terhadap pemerintahan yang baru mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat atas stabilitas ekonomi, akses layanan kesehatan dan sosial yang adil, serta tata kelola pemerintahan yang bersih. Melalui analisis yang melibatkan berbagai teori, seperti fungsionalisme struktural, konflik, pilihan rasional, kebijakan publik, legitimasi Max Weber, dan kebutuhan dasar Maslow, nampak bahwa masyarakat menginginkan kebijakan yang inklusif, efektif, dan memihak rakyat kecil. Terwujudnya harapan-harapan itu melalui program-program kerja dengan tata kelola pemerintahan yang transparan menjadi indikator penting bagi legitimasi dan keberhasilan rezim pemerintahan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Turama, A. R. (2020). Formulasi teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69
- Teori, E. S. M. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi konflik: teori-teori dan analisis*. Kencana.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.

